



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

LKJIP

TAHUN 2025

**KECAMATAN
MUARA WIS**



JL. PATIN NO. 33 RT 08
MUARA WIS



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara keseluruhan LKjIP tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah



ditetapkan dalam RPJMD sesuai Renstra Perubahan tahun 2021-2026 telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga kita dapat mewujudkan visi, misi, dan sasaran yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Renstra Perubahan Kecamatan Muara Wis. Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government.

Pada akhirnya laporan ini kiranya dapat memberi manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja dimasa mendatang dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi khususnya Kecamatan Muara Wis. Semoga LKjIP Kecamatan Muara Wis ini juga dapat berguna sebagaimana mestinya.

Muara Wis, 26 Februari 2026

Camat Muara Wis

FADHLI ANNUR, S.Pd
Pembina/ IV.a

NIP. 19710605 199603 1 004



IKHTISAR EKSKLUSIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Wis berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis suatu organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur dan dapat diujikan diandalkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan yang termuat dalam Renstra Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam dokumen rencana strategis. Berdasarkan dokumen renstra, sasaran Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan Indikator Kinerja Utama yaitu **"Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan"**. Dalam Perjanjian Kinerja 2025 terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama tambahan yaitu:

- 1 Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)
- 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- 3 Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya
- 4 Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah
- 5 Jumlah Inovasi Perangkat Daerah
- 6 Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
- 7 Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia
- 8 Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"
- 9 Nilai LPPD
- 10 Nilai SAKIP Kabupaten
- 11 Indeks RB Kabupaten
- 12 Indeks Inovasi Daerah
- 13 Indeks Pelayanan Publik
- 14 Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Ringkasan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Muara Wis	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
2	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Muara Wis	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100
3	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Muara Wis	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	6.5	26.67	410.31
4	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Muara Wis	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	0	0	0
5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	0	0
6	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88.3	95.77	108.46
7	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100
8	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3	100
9	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100
10	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100
11	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100
12	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48	100
13	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.7	3.2568	88.02
14	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65.92	85.61
15	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	100	100	100.00
16	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52.56	59.81	113.79
17	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90	94.46	104.96
18	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	100.00

Rata-rata realisasi kinerja Kecamatan Muara Wis tahun 2025 sebesar **106,17%** termasuk dalam kategori peringkat kinerja **"SANGAT TINGGI"**.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
IKHTISAR EKSKLUSIF		ii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	2
	1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	2
	1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	3
	1.5 Uraian Singkat Organisasi	4
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	9
	2.1 Perencanaan Strategis	9
	2.2 Perjanjian Kinerja	12
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	15
	3.1 Capaian Kinerja	15
	3.2 Realisasi Anggaran	34
BAB IV	PENUTUP	36
	4.1 Kesimpulan	36
	4.2 Perbaikan Kedepan	37
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas wilayah Desa di Kecamatan Muara Wis	5
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Wis Semester II Tahun 2024	6
Tabel 1.3	ASN berdasarkan Pendidikan	8
Tabel 1.4	ASN berdasarkan Golongan	8
Tabel 1.5	ASN berdasarkan Status	8
Tabel 2.1	Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	10
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Muara Wis Tahun 2021-2026	10
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan	11
Tabel 2.4	Keselarasan Program dan Indikator Kinerja Tahun 2024	11
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
Tabel 2.6	Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026	13
Tabel 3.1	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	16
Tabel 3.2	Realisasi Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Muara Wis	19
Tabel 3.3	Nilai SKM Per Unsur Pelayanan tahun 2025	20
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	25
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	26
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis	27
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Muara Wis dengan Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025	29
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	29
Tabel 3.9	Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	30
Tabel 3.10	Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	30
Tabel 3.11	Indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	31
Tabel 3.12	Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	31
Tabel 3.13	Indikator Kinerja Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis	33
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Tahun 2025	34
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran Tahun 2024	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rangkaian sistemik tersebut meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Kecamatan Muara Wis dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun:

- 1) Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Muara Wis Tahun 2021-2026;
- 2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Wis Tahun 2025;
- 3) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Muara Wis Tahun 2025; dan
- 4) Perjanjian Kinerja (PK) Camat Muara Wis Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Muara Wis



2. Mendorong Kecamatan Muara Wis di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Muara Wis untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Muara Wis di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- 6) Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1 Tugas Pokok Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.



1.3.2 Fungsi Kecamatan

Camat melaksanakan tugas dan fungsi:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

1.4.1 Permasalahan

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Muara Wis dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Muara Wis pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kecamatan Muara Wis. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- c. Perkembangan teknologi yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- d. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.



- e. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

1.4.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial yang mencakup peningkatan Pelayanan, tata kelola pemerintahan dan peningkatan SDM yang ada pada kecamatan Muara Wis adalah sebagai berikut :

- a) Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, efisien, dan transparan.
- b) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- c) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- d) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
- e) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kecamatan Muara Wis dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

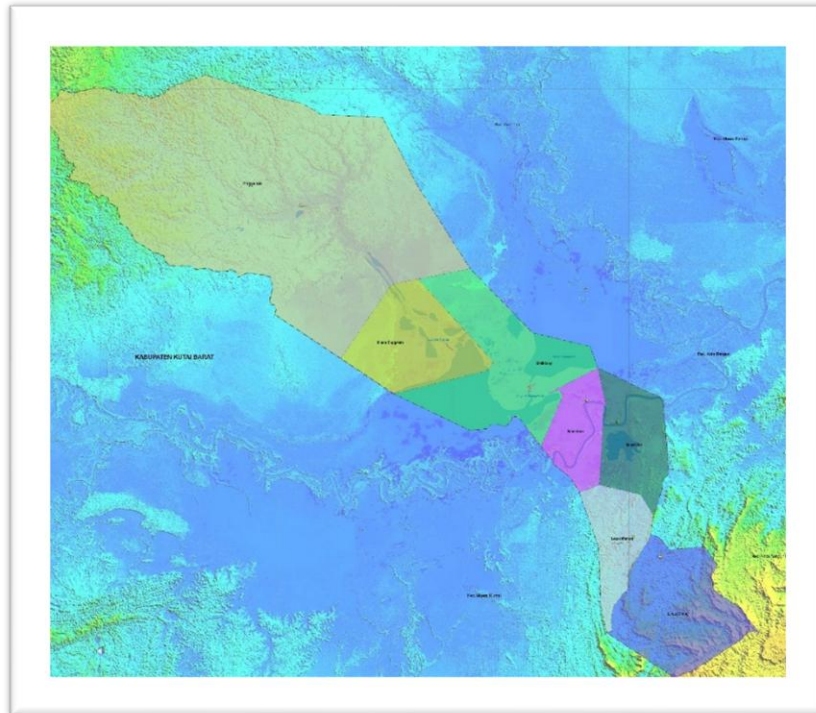
1.5 Uraian Singkat Organisasi

Kecamatan Muara Wis masuk dalam zona Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang terletak diantara terletak antara 115°58' BT–116°31' BT dan 0°00' LU–0°29' LS dengan luas wilayah mencapai 1.108,16 km². Kecamatan Muara Wis secara administratif berbatasan dengan, Sebelah Utara: Kecamatan Kenohan, Sebelah Timur: Kecamatan Kota Bangun, Sebelah Selatan: Kecamatan Muara Muntai, Sebelah Barat: Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat.

Luas Kecamatan Muara Wis 1.108,16 Km². Secara administratif Kecamatan Muara Wis terdiri atas 7 desa, yaitu Desa Muara Wis, Desa Sebemban, Desa Lebak Mantan, Desa Lebak Cilog, Desa Melintang, Desa Muara Enggelam dan Desa Enggelam. Adapun ibukota kecamatan terletak di Desa Muara Wis. Dari desa tersebut, Desa Enggelam merupakan desa yang letaknya paling jauh dari ibukota kecamatan, yaitu 32 kilometer, sedangkan Desa Sebemban merupakan desa yang letaknya paling dekat dari ibukota kecamatan, yaitu 4 kilometer. Pada umumnya, semua desa yang ada di Kecamatan Muara Wis dapat ditempuh melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat maupun melalui jalan sungai dengan menggunakan perahu atau perahu motor.



Gambar 1.1. Peta Wilayah Administratif Kecamatan Muara Wis



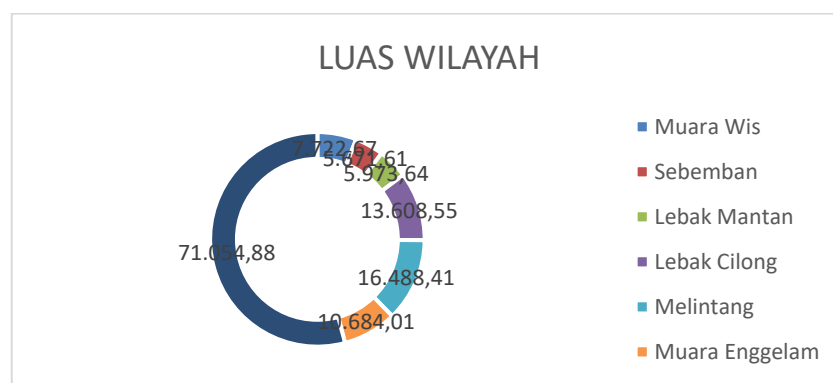
Dengan luas wilayah desa di kecamatan Muara Wis sebagai berikut:

Tabel 1.1

Luas wilayah Desa di Kecamatan Muara Wis

NO.	NAMA DESA	Luas (km2)
1	Muara Wis	7,722.67
2	Sebemban	5,671.61
3	Lebak Mantan	5,973.64
4	Lebak Cilog	13,608.55
5	Melintang	16,488.41
6	Muara Enggelam	10,684.01
7	Enggelam	71,054.88
JUMLAH		131,203.77

Sumber Data: Seksi Pemerintahan Kecamatan Muara Wis



Jumlah penduduk Kecamatan Muara Wis pada tahun 2024 mencapai 10.210 jiwa. Adapun persebaran jumlah penduduk Kecamatan Muara Wis per desa adalah:

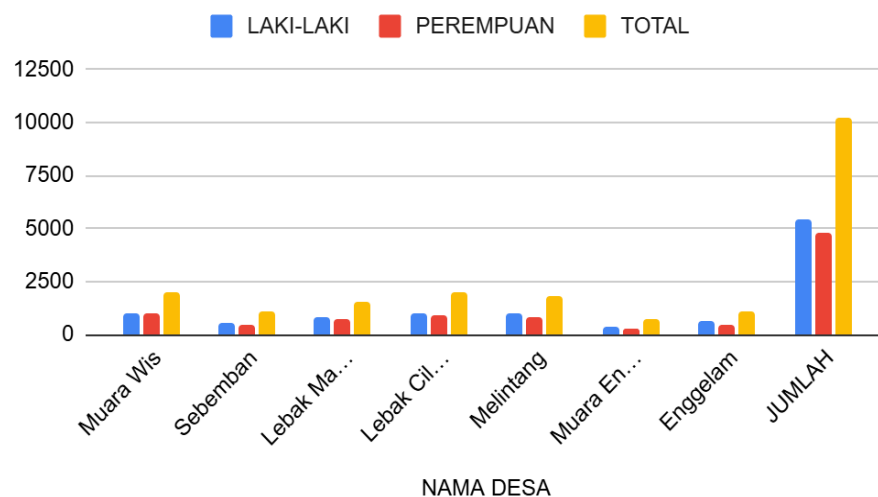
Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Wis Tahun 2025

NO.	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Muara Wis	1.042	976	2.018
2	Sebemban	570	494	1.064
3	Lebak Mantan	825	760	1.585
4	Lebak Cilong	1.043	951	1.994
5	Melintang	969	833	1.802
6	Muara Enggelam	367	325	692
7	Enggelam	604	454	1.058
JUMLAH		5.420	4.793	10.213

Sumber Data: Seksi Pemerintahan Kecamatan Muara Wis

JUMLAH PENDUDUK



Secara keseluruhan, total populasi mencapai 10.213 jiwa. Distribusinya cukup bervariasi antar desa. Populasi tertinggi yaitu Desa Muara Wis (2.018 jiwa) dan Lebak Cilong (1.994 jiwa). Kedua desa ini menjadi pusat konsentrasi penduduk karena mencakup hampir 40% dari total populasi seluruh wilayah. Populasi terendah yaitu Desa Muara Enggelam hanya memiliki 692 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan kepadatan yang cukup signifikan antar desa.

Adapun Perbandingan Gender (Rasio Jenis Kelamin) menunjukkan dominasi jumlah laki-laki di seluruh desa tanpa pengecualian, yaitu:

- Total Laki-laki: 5.420 jiwa (53,1%)
- Total Perempuan: 4.793 jiwa (46,9%)

Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Struktur organisasi Kecamatan Muara Wis diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat; Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat,
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Kecamatan Muara Wis per 31 Desember 2025 sebanyak 52 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:



a. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.3

ASN berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
1	SD	1	1	2	3.85
2	SLTP			0	0.00
3	SLTA	26	12	38	73.08
4	D-III			0	0.00
5	S1	7	3	11	21.15
6	S2	2		1	1.92
7	S3				0.00
	Jumlah	36	16	52	100

Sumber Data: Subbag Umum Tatalaksana dan kepegawaian Kecamatan Muara Wis

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.4

ASN berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	I	0	0	0	0,00%
2	II	17	6	23	76,67%
3	III	2	2	4	13,33%
4	IV	3	0	3	10,00%
	Jumlah	22	8	30	100%

Sumber Data: Subbag Umum Tatalaksana dan kepegawaian Kecamatan Muara Wis

c. Berdasarkan Status ASN

Tabel 1.5

ASN berdasarkan Status

No.	Status	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	PNS	22	8	30	0,00%
2	PPPK	14	8	22	0,00%
	Jumlah	36	16	52	100%

Sumber Data: Subbag Umum Tatalaksana dan kepegawaian Kecamatan Muara Wis



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Wis merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang didalamnya menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan pada Kecamatan Muara Wis yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Kecamatan Muara Wis telah Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”**. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Wis adalah Misi ke-1 (satu) yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Muara Wis Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi Yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	1. Persentase Keluhan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan yang ditindak lanjuti 2. Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Muara Wis Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	81	82	83	84	85	85
		1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100
			2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100	100	100	100
			3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (Khusus Kecamatan yang memiliki Desa)	Persen	5	5,5	6	6,5	7	7

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan rangkaian langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah

ditetapkan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan perangkat daerah merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Muara Wis Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan

No	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 3. Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 4. Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2. Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan
3.	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja.

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran pada Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Keselarasan Program dan Indikator Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
		Tingkat Akseibilitas Wilayah Kecamatan	



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
		Persentase Desa yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa dalam Kategori Baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Keterangan/ Rumus Perhitungan
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah keluhan masyarakat kali 100
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	Jumlah laporan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah laporan gangguan trantibum kali 100
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	6,5	Nilai PADes Tahun N dikurangi Nilai PADes Tahun N-1 dibagi Nilai PADes Tahun N-1 kali 100
2	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Muara Wis	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	0	
3	Meningkatnya Keterlibatan	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut	Persen	100	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Keterangan/ Rumus Perhitungan
	Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)			
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88.3	
5	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	
7	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	
8	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	
9	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	
10	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	
11	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.7	
12	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	
13	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	100	
14	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52.56	
15	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90	
		Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	

Tabel 2.6

Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Data Awal 2021	Target 2025	Target Akhir Renstra 2026
1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100	100
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	NA	100	100
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	NA	6,5	7
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	NA	0	NA
5	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	NA	100	NA
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	NA	88.3	NA
7	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	NA	100	NA
8	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	NA	3	NA
9	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	NA	1	NA
10	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	NA	100	NA



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Data Awal 2021	Target 2025	Target Akhir Renstra 2026
11	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	NA	100	NA
12	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	NA	48	NA
13	Nilai LPPD	Nilai	NA	3.7	NA
14	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	NA	77	NA
15	Indeks RB Kabupaten	Nilai	NA	100	NA
16	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	NA	52.56	NA
17	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	NA	90	NA
18	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	NA	Zona Hijau	NA

Dari delapan belas (18) Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Wis Tahun 2025, hanya ada tiga (3) indikator sasaran yang masuk pada dokumen Renstra Muara Wis Tahun 2021-2026. Sehingga tidak semua indikator kinerja dapat diperbandingkan dengan data awal dan target akhir Renstra.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Kecamatan Muara Wis Tahun 2025, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = 1 + \frac{\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK).

Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa **skala ordinal**. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :



Skala Ordinal Pengukuran Sasaran		
No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	< 50	Sangat Rendah

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi kedepan yang perlu dilaksanakan.

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja keseluruhan Kecamatan Muara Wis tahun 2025 sebesar 106,20%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Muara Wis	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Muara Wis	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Muara Wis	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	6.5	26.67	410.31	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Muara Wis	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	0	0	0	-
5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan	Persen	100	0	0	Sangat Rendah



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	KRITERIA
	Forum Konsultasi Publik	Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)					
6	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88.3	95.77	108.46	Sangat Tinggi
7	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
8	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3	100	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100	Sangat Tinggi
10	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
12	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48	100	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.7	3.2568	88.02	Tinggi
14	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65.92	85.61	Tinggi
15	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	100	100	100.00	Sangat Tinggi
16	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52.56	59.81	113.79	Sangat Tinggi
17	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90	94.46	104.96	Sangat Tinggi
18	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	100.00	Sangat Tinggi

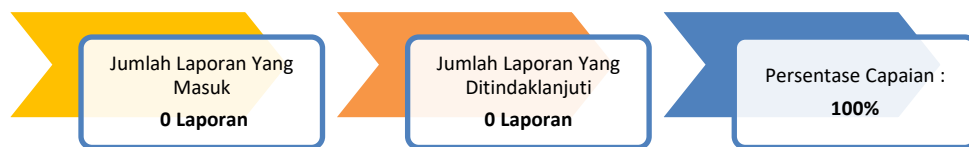
Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut:



1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan

1.1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di kecamatan. Target indikator kinerja Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100% atau **sangat tinggi**.



Faktor pendukung dari capaian ini adalah petugas pelayanan bisa melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang masih ada adalah sarana dan prasarana pendukung pelayanan kurang lengkap.

1.2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur. Salah satu fungsi utama kecamatan adalah Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Target indikator kinerja Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2025 sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100% atau **sangat tinggi**.



Faktor pendukung capaian ini adalah kesadaran masyarakat dalam rangka ikut serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya masing-masing, sehingga meminimalisir terjadinya gangguan-gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.



1.3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa adalah pendapatan desa yang meliputi: hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Target indikator kinerja Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa pada tahun 2025 sebesar 6,5% dan terealisasi sebesar 26,67% sehingga persentasenya mencapai 410,31% atau **Sangat tinggi**.

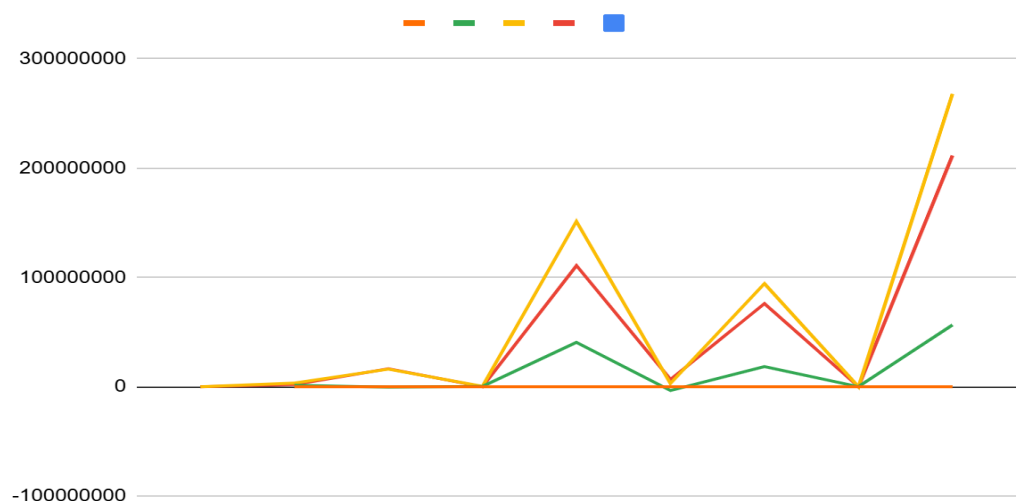
Dari total 7 (tujuh) desa di kecamatan Muara Wis, terdapat 1 (satu) desa yang tidak mempunyai PADes yang pada tahun 2024 ada 2 (dua) desa. Terdapat 2 (dua) desa yang mengalami penurunan, dan 3 (tiga) desa mengalami peningkatan. Jumlah Pendapatan Asli Desa 2 tahun terakhir bisa dilihat pada table berikut:

Tabel 3.2

Realisasi Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Muara Wis

No	Desa	2024	2025	Naik/ (Turun)	Persentase
1	Muara Wis	2,000,000.00	3,251,342.00	1,251,342.00	62.57
2	Enggelam	16,397,000.00	15,983,250.00	(413,750.00)	(2.52)
3	Sebemban	0.00	234,810.00	234,810.00	100.00
4	Lebak Mantan	110,695,639.00	151,256,874.00	40,561,235.00	36.64
5	Lebak Cilog	6,500,000.00	3,000,000.00	(3,500,000.00)	(53.85)
6	Muara Enggelam	76,000,000.00	94,296,000.00	18,296,000.00	24.07
7	Melintang	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		211,592,639.00	268,022,276.00	56,429,637.00	26.67

Sumber Data : Seksi PMD Kecamatan Muara Wis



2. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah kegiatan dialog dan diskusi antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat. FKP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2025 Kecamatan Muara Wis belum melaksanakan Forum Konsultasi Publik.

Target Indikator Kinerja Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan target 100% terealisasi 0% sehingga capaian kinerjanya mencapai 0% atau **sangat rendah**.

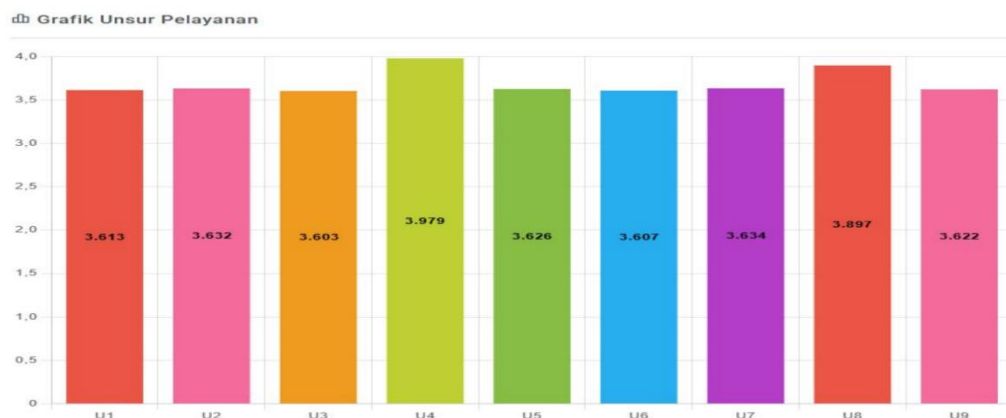
3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Target indikator kinerja IKM Kecamatan Muara Wis pada tahun 2025 dengan nilai 88,3 dan dapat terealisasi dengan nilai 95,77 sehingga capaian kinerjanya mencapai 108,46% atau **sangat tinggi**.

Tabel 3.3
Nilai SKM Per Unsur Pelayanan Tahun 2025

	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3,613	3,632	3,603	3,979	3,626	3,607	3,634	3,897	3,622
Kategori	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
IKM Unit Pelayanan	95.77 (SANGAT BAIK)								





4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Target Indikator Kinerja Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir dengan target 100% dapat terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% atau **sangat tinggi**.

Dari hasil audit Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Kecamatan Muara Wis tahun anggaran 2025 oleh Bapak Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, tidak ada hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.

5. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP merupakan sistem yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan SPIP adalah memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan, menjamin keandalan pelaporan keuangan, mengamankan aset negara, menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Target Indikator Kinerja Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah dengan target nilai 3 dapat terealisasi nilai 3 sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% atau **sangat tinggi**. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 tidak ada lagi nilai maturitas SPIP OPD tetapi nilai maturitas SPIP Pemerintah Daerah.

6. Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Badan Riset Daerah pada tahun 2025 mengadakan pekan inovasi dan kreativitas dengan tema “Inovasi dan Kreativitas Untuk Akselerasi pencapaian Kukar Idaman Terbaik” yang bertujuan agar tercipta perubahan-perubahan menuju tradisi, pola, dan cara baru melalui gerakan Satu Instansi Satu Inovasi (One Agency One Innovation) yang mewajibkan 1 (satu) Perangkat Daerah atau Unit Kerja untuk menghasilkan paling sedikit 1 (satu) inovasi pelayanan publik setiap tahunnya sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Target indikator kinerja Jumlah Inovasi Perangkat Daerah dengan target 1 inovasi dapat terealisasi 1 inovasi sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% atau **sangat tinggi**. Kecamatan Muara Wis pada tahun 2025 membuat inovasi yang berjudul “GERBANG KARIER KETENAGAKERJAAN”.



Nama “Gerbang Karier” dipilih sebagai simbol bahwa kecamatan hadir sebagai pintu gerbang yang membuka akses menuju masa depan kerja yang lebih baik bagi masyarakat di kecamatan Muara Wis. Melalui Gerbang Karier, pemerintah kecamatan berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan yang proaktif, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mendorong tumbuhnya peluang kerja lokal. Dengan kolaborasi semua pihak, Gerbang Karier menjadi bukti bahwa perubahan dapat dimulai dari tingkat kecamatan demi kesejahteraan masyarakat.

7. Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor

SP4N-LAPOR adalah layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik di Indonesia. SP4N-LAPOR merupakan singkatan dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.

Target indikator kinerja Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor dengan target 100% dapat terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% atau **sangat tinggi**.

8. Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar-instansi pusat maupun daerah.

Target Indikator Kinerja Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia dengan target 100% dapat terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% atau **sangat tinggi**. Pada tahun 2025 Kecamatan Muara Wis menginput seluruh data pada aplikasi Satu Data Kukar.

9. Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah

Gerakan Etam Mengaji (GEMA) adalah program unggulan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang bertujuan memasyarakatkan Al-Qur'an dan membangun karakter religius di seluruh lapisan masyarakat serta lingkungan kerja.

Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" dengan target 48 (empat puluh delapan) Laporan, sudah terealisasi sebanyak 48 (empat puluh delapan) laporan, sehingga capaian kinerjanya 100% atau **sangat tinggi**.

10. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

LPPD merupakan laporan yang disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Laporan ini berisi capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran. Tujuan LPPD Mencerminkan ketinggian atau tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sebagai perwujudan akuntabilitas, Sebagai pelaksanaan prinsip tata



pemerintahan yang baik.

Target indikator kinerja Nilai LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 dengan target nilai 3,7 terealisasi dengan nilai 3,2568 sehingga capaian kinerjanya mencapai 88,02% atau **tinggi**.

11. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa nilai sebesar 65,92 dengan predikat “**B**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Baik**”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagai unit kerja utama, namun masih perlu adanya upaya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Target indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada tahun 2025 dengan nilai 77 dapat terealisasi dengan nilai 65,92 sehingga capaian kinerjanya sebesar 85,61% atau **tinggi**.

12. Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan indikator yang mengukur keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan di instansi pusat maupun daerah. Pada tahun 2024-2025, fokus penilaian bergeser pada RB Tematik atau "RB Berdampak" yang mengukur kontribusi nyata pemerintah terhadap masalah makro seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan pengendalian inflasi.

Target indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten pada tahun 2025 sebesar 100% dapat terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% atau **sangat tinggi**.

13. Meningkatnya Inovasi Daerah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan skor indeks 59,81 dengan predikat “**inovatif**”, meningkat dari pencapaian tahun lalu yang mendapatkan skor indeks 58,59.

Target indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2025 dengan skor indeks sebesar 52,56 dapat terealisasi dengan skor indeks 59,81 sehingga capaian kinerjanya mencapai 113,79% atau **sangat tinggi**.

14. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan



Pelayanan Publik pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2025, Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai 4,35 (dengan skala 1-5), jika dikonversikan dengan skala 1-10 maka nilainya 8,7 atau kategori (A-).

Target indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah pada tahun 2025 sebesar 90 dapat terealisasi 94,46 sehingga capaian kinerjanya hanya 104,96% atau **sangat tinggi**.

15. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan Keputusan Ombudsman Republik Indonesia tentang Hasil Penilaian kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan pelayanan Publik), Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai 94,46, zona hijau, kategori A, opini Kualitas Tertinggi.

Target indikator kinerja Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah pada tahun 2025 adalah zona hijau dan dapat terealisasi dengan zona hijau, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% atau **sangat tinggi**.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 106,17%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2024) sebesar 97,49%. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 8,68%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024			2025			KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Muara Wis	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
2	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Muara Wis	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
3	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Muara Wis	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	6	21,07	351,17	6.5	26.67	410.31	Naik



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024			2025			KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
4	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Muara Wis	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	0	0	0	0	0	0	Tetap
5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	0	0,00	100	0	0	Tetap
6	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83	94,9	114,34	88.3	95.77	108.46	Turun
7	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
8	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	100	100	100	3	3	100	Tetap
9	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100	1	1	100	Tetap
10	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
11	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
12	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	1	1	100,00	48	48	100	Tetap
13	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6	31,135	86,49	3.7	3.2568	88.02	Naik
14	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	73	65,92	90,30	77	65.92	85.61	Turun
15	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien,	Indeks RB Kabupaten	Nilai	64	60,12	93,94	100	100	100.00	Turun



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024			2025			KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIA N	TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
	inovatif, akuntabel, bersih dan melayani									
16	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	49,57	58,59	118,20	52.56	59.81	113.79	Turun
17	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	8,95	8,7	97,21	90	94.46	104.96	Naik
18	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	100,00	Zona Hijau	Zona Hijau	100.00	Tetap

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	2024			2025			KET
				TARGE T	REALISA SI	CAPAIA N	TARGE T	REALISA SI	CAPAIA N	
1	Tujuan : Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		83	94.9	114.34	84	95.77	114.01	Turun
2	Sasaran : Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Muara Wis	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	6	21.07	351.17	6.5	26.67	410.31	Naik
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	63	49.83	79.10	64	57.57	89.95	Naik
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	100.00	100	100	100.00	Tetap
		Tingkat Akseibilitas	Persen	78.5	78.5	100.00	78.5	78.5	100.00	Tetap



NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	2024			2025			KET
				TARGE T	REALISA SI	CAPAIA N	TARGE T	REALISA SI	CAPAIA N	
		Wilayah Kecamatan								
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	100.00	100	100	100.00	Tetap
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	Persen	100	100	100.00	100	100	100.00	Tetap
7	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100.00	100	100	100.00	Tetap
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggara an Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	71.4	100	140.06	85.7	83.57	97.51	Turun

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Muara Wis sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Realisasi Renstra Sampai Tahun 2025	Persentase Realisasi Renstra Sampai Tahun 2025
1	Tujuan : Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	95.77	112.67
2	Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik	Persentase keluhan masyarakat terhadap	Persen	100	100	100



NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Realisasi Renstra Sampai Tahun 2025	Persentase Realisasi Renstra Sampai Tahun 2025
	Kecamatan Muara Wis	pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti				
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	7	26.67	381.00
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	65	57.57	88.57
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	100
		Tingkat Aksebilitas Wilayah Kecamatan	Persen	78.5	78.5	100
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	100
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	Persen	100	100	100
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	85.7	83.57	97.51

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Muara Wis dengan Kecamatan Lain Tahun 2025

Pada data ini kami akan membandingkan realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama pada tahun 2025 antara Kecamatan Muara Wis dan Kecamatan Kota Bangun. Adapaun datanya disajikan dalam tabel dibawah ini :



Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Muara Wis dengan Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Muara Wis		Sebulu	
			Capaian Kinerja Sasaran	Predikat	Capaian Kinerja Sasaran	Predikat
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100	Sangat Tinggi	104	Sangat Tinggi
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Sangat Tinggi	101	Sangat Tinggi
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	410,31	Sangat Tinggi	38	Sangat Rendah

3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Kecamatan Muara Wis tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran	EFISIENSI %	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=3-5	7
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	82.53	120.91	Efisien
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	79.14	124.3	Efisien
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	83.84	119.6	Efisien
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	410.31	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	88.35	115.09	Efisien
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.9	152.54	Efisien
		203.44		80.64	122.8	Efisien

Indikator kinerja Presentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang Dilaksanakan sesuai SOP dengan target sebesar 100 persen dapat terealisasi 100 persen sehingga capaian kinerjanya 100 Persen. Faktor pendukung tercapainya target kinerja tersebut diantaranya adalah petugas pelayanan mampu melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.

Indikator Kinerja Tingkat Akseibilitas Wilayah Kecamatan dengan target sebesar 78,5 persen dan tercapai 78,5 persen, sehingga capaian kinerjanya 100%. Target indikator tingkat akseibilitas wilayah kecamatan sulit untuk ditingkatkan dikarenakan faktor eksternal terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur yang berskala besar seperti pembangunan jembatan dan pelabuhan untuk desa-desa yang belum terhubung melalui jalur darat.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan

Tabel 3.11

Indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan

Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	100	100	100

Indikator kinerja Persentase Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan dengan target sebesar 100 persen dan terealisasi 100 persen, sehingga capaian kinerjanya 100 persen. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kecamatan Muara Wis aktif dalam berpartisipasi mengikuti kegiatan-kegiatan baik yang dilaksanakan oleh desa, kecamatan maupun kabupaten. Terutama dalam mengikuti musrenbang tingkat kecamatan untuk memberikan masukan-masukan untuk pembangunan di wilayah kecamatan.

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Tabel 3.12

Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100

Indikator Kinerja Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target



kinerja sebesar 100 persen dan realisasi 100 persen sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 persen. Seluruh kegiatan yang dalam program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bisa dilaksanakan.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 3.13

Indikator Kinerja Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100	100	100

Indikator Kinerja Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan target sebesar 100 persen dan terealisasi 100 persen, sehingga capaian kinerjanya 100 persen. Faktor pendukung capaian kinerja program tersebut adalah tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungannya masing-masing serta kerjasama dengan pihak kepolisian dan tentara ditingkat kecamatan yang terjalin dengan baik.



Tabel 3.14

Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64	57,57	89,95	Sistem manajemen kinerja belum terimplementasi dengan sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	100	100	- Petugas pelayanan mampu melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan - Terkendala dengan faktor eksternal terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur yang berskala besar seperti pembangunan jembatan dan pelabuhan untuk desa-desa yang belum terhubung melalui jalur darat
		Tingkat Akseibilitas Wilayah Kecamatan	78,5	78,5	100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	100	100	Kecamatan Muara Wis aktif dalam melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kecamatan maupun kabupaten
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	Seluruh kegiatan pada program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bisa dilaksanakan.
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100	100	100	- Tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungannya masing-masing - Kerjasama dengan pihak kepolisian dan tentara ditingkat kecamatan yang terjalin dengan baik



3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 pada Kecamatan Muara Wis dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 80,64% adapun realisasi anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Program	Indikator Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase %
Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	8,608,456,112	7,104,394,772	82.53
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	12,050,575,992	9,536,308,378	79.14
		Tingkat Akseibilitas Wilayah Kecamatan			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	571,395,450	479,035,000	83.84
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	82,557,000	42,025,000	50.90
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	336,868,000	297,620,000	88.35
Total			21,649,852,554	17,459,383,150	80.64

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2024) realisasi anggaran sebesar 92,70%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program	Indikator Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6.954.664.440	5.828.646.399	83,81
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan	10.479.682.000	10.385.087.646	99,10



Sasaran Strategis	Program	Indikator Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		sesuai SOP			
		Tingkat Akseibilitas Wilayah Kecamatan			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	145.000.000	118.212.500	81,53
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	329.265.000	253.430.000	76,97
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa dalam Kategori Baik	425.000.000	410.015.000	96,47
Total			18.333.611.440	16.995.391.545	92,70



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 rata-rata sebesar **106,17%** (**Sangat Tinggi**), dengan rincian sebagai berikut .:

- 1 Capaian Indikator Kinerja **"Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti"** sebesar **100% (Sangat Tinggi)**;
- 2 Capaian Indikator Kinerja **"Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum"** sebesar **100% (Sangat Tinggi)**;
- 3 Capaian Indikator Kinerja **"Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa"** sebesar **410.31% (Sangat Tinggi)**;
- 4 Capaian Indikator Kinerja **"Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan"** sebesar **0% (Sangat Rendah)**;
- 5 Capaian Indikator Kinerja **"Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)"** sebesar **0% (Sangat Rendah)**;
- 6 Capaian Indikator Kinerja **"Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)"** sebesar **108,46% (Sangat Tinggi)**;
- 7 Capaian Indikator Kinerja **"Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya"** sebesar **100% (Sangat Tinggi)**;
- 8 Capaian Indikator Kinerja **"Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah"** sebesar **100% (Sangat Tinggi)**;
- 9 Capaian Indikator Kinerja **"Jumlah Inovasi Perangkat Daerah"** sebesar **100% (Sangat Tinggi)**;
- 10 Capaian Indikator Kinerja **"Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor"** sebesar **100% (Sangat Tinggi)**;
- 11 Capaian Indikator Kinerja **"Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia"** sebesar **100% (Sangat Tinggi)**;
- 12 Capaian Indikator Kinerja **"Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)""** sebesar **100% (Sangat Tinggi)**;
- 13 Capaian Indikator Kinerja **"Nilai LPPD"** sebesar **88,02% (Tinggi)**;
- 14 Capaian Indikator Kinerja **"Nilai SAKIP Kabupaten"** sebesar **85,61% (Tinggi)**;
- 15 Capaian Indikator Kinerja **"Indeks RB Kabupaten"** sebesar **100% (Sangat Tinggi)**;
- 16 Capaian Indikator Kinerja **"Indeks Inovasi Daerah"** sebesar **113,79% (Sangat Tinggi)**;
- 17 Capaian Indikator Kinerja **"Indeks Pelayanan Publik"** sebesar **100% (Sangat Tinggi)**;
- 18 Capaian Indikator Kinerja **"Kepatuhan Standar Pelayanan Publik"** sebesar **100% (Sangat Tinggi)**;



Capaian kinerja tahun 2025 meningkat jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2024 capaian kinerja Kecamatan Muara Wis sebesar 97,49% sedangkan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 106,17% atau mengalami peningkatan sebesar 8,68%.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2025, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Perlunya Kerangka Acuan Kerja yang terarah dan terukur pada setiap bidang;
- 2) Perlunya komunikasi dan Koordinasi untuk pencapaian Tujuan Organisasi;
- 3) Perlunya Pemahaman dan Pelaksanaan yang tepat serta dapat di pertanggungjawabkan atas Kinerja oleh masing-masing bidang sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Tupoksi;
- 4) Perlunya Pembinaan, Arahan untuk memperkuat kinerja Organisasi, khususnya Kecamatan Muara Wis.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Wis Tahun 2025, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.



Camat Muara Wis

Fadhli Annur, S.Pd
Pembina/ IV.a

NIP. 19710605 199603 1 004

